

Agama dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu

Osian Orjumi Moru

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

osianmoru@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to describe various forms of formalization, interpretation, and concretization of the relationship between religious and political entities that are integralistic, intersectional, or secular in the context of Indonesia and the United Kingdom of Israel. The approach used to describe the above is a hermeneutic approach through literature study. The results of the study show that the relationship between religious and political entities, both in the context of the Indonesian state and the context of the United Kingdom of Israel is an intersectional and integralistic relationship. The model and the nature of these relations are clearly seen in the pattern and process of selecting the head of government, the elaboration of ideology and the basis of the state, such as in the formation of Pancasila and the J source, to the concretization of forms of community social interaction which are always related to socio-religious dynamics. At this point, although the state of Indonesia and the United Kingdom of Israel have different contexts and concepts of government, the relationship between religious and political entities is a form of reciprocal relationship and reflects the concept of idealistic culture.

Keywords: religion; Indonesia; the United Kingdom of Israel; politics

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan berbagai bentuk formalisasi, interpretasi, maupun konkretisasi hubungan antara entitas agama dan politik yang bersifat integralistik, *intersectional*, ataupun sekularistik baik pada konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan perihal di atas adalah pendekatan hermeneutik melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara entitas agama dan politik baik pada konteks negara Indonesia maupun konteks Kerajaan Israel Bersatu merupakan relasi yang bersifat *intersectional* dan integralistik. Model dan sifat relasi tersebut terlihat jelas dalam pola dan proses pemilihan kepala pemerintahan, elaborasi ideologi dan dasar negara seperti dalam pembentukan Pancasila dan sumber Y, sampai pada bentuk-bentuk konkretisasi interaksi sosial masyarakat yang selalu berhubungan dengan dinamika sosial-keagamaan. Pada titik ini, meski negara Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu memiliki perbedaan konteks dan konsep pemerintahan, namun relasi antara entitas agama dan politik menjadi bentuk relasi yang resiprokal dan mencerminkan konsep *idealistic culture*.

Kata Kunci: agama; Indonesia; Kerajaan Israel Bersatu; politik



Info Artikel

Diterima: 28 Januari 2022

Direvisi: 23 Juni 2022

Disetujui: 25 Juni 2022

Pendahuluan

Pada dasarnya dinamika persoalan menyangkut hubungan antara agama dan politik dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia sangatlah erat dan kompleks. Menurut Wasisto Raharjo Jati, relasi agama dan politik menjadi suatu relasi resiprokal yang melibatkan proses tarik menarik kepentingan secara kolektif.¹ Hal ini menempatkan agama dan politik sebagai dua entitas yang memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi struktur dari nilai-nilai sosial suatu negara dan masyarakatnya. Hubungan yang erat dan kompleks antara agama dan politik, tersajikan dalam berbagai catatan sejarah yang mendeskripsikan adanya pengaruh timbal balik yang besar antara kedua entitas tersebut baik dalam konteks lokal maupun global.

Dalam berbagai catatan sejarah dunia, agama memiliki dimensi khusus dan penting dalam upaya mewujudkan suatu proses legitimasi secara dogmatik² atas dinamika perpolitikan suatu bangsa. Hal ini menandai adanya pengaruh besar dimensi keagamaan dalam mendorong suatu sistem “simbiosis mutualisme” antara agama dan proses politik kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ini, hubungan antara agama dan politik menjadi suatu hubungan yang bersifat kontekstual dan otonom. Bersifat kontekstual dan otonom berarti hubungan antara agama dan politik memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan lingkungan sosio-geografis dan kultural suatu masyarakat.

Periode panjang sejarah hubungan antara agama dan politik menjadi wacana perdebatan pro-kontra yang sangat tajam hingga menimbulkan berbagai persepsi dan teori yang menghubungkan pengaruh timbal-balik antara agama dan politik baik pada taraf lokal maupun global. Pada berbagai publikasi artikel ilmiah, terdapat dua sisi konstruksi persepsi yang secara ekstrim bertolak belakang dalam melihat dan menempatkan posisi hubungan antara agama dan politik secara multidimensional. Pada kutub pertama, terdapat pandangan atau sikap yang menghendaki adanya pemisahan tegas antara entitas agama dengan politik pada konteks kehidupan suatu masyarakat. Pada persepsi ini, kolusi antara agama dan politik dianggap sebagai bentuk tindakan haram dan sekularisasi agama. Pada kutub yang kedua, entitas agama dan politik kekuasaan terkonstruksi pada pola saling mendominasi yang dapat mengakibatkan adanya hipokrisi moral yang dilahirkan oleh suatu sistem teokrasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya proses depolitisasi dan demoralisasi agama dalam sejarah bangsa-bangsa.³ Pada taraf ini, hubungan asosiatif maupun disosiatif antara agama dan politik kekuasaan menjadi hubungan yang penting dalam menyikapi peranan entitas agama maupun politik kekuasaan dalam realitas sosial masyarakat.

Dua kutub persepsi di atas menandai adanya kompleksitas hubungan antara agama dan politik dalam dimensi sosial dan kultural masyarakat. Realita kerumitan hubungan antara agama dan politik dalam berbagai sektor publik tersebut, kemudian tidak menghilangkan esensi dari realita sosial bahwa agama dan politik terpaut secara kompleks dalam konteks masyarakat yang serba plural. Kenyataan ini terlihat secara jelas dalam dua konteks masyarakat yang berbeda zaman yakni masyarakat Indonesia dalam konteks negara kebinekaan yang modern dan masyarakat pada masa Kerajaan Israel Bersatu dalam konteks pola pemerintahan teokrasi yang konservatif.

Banyak tulisan dalam karya ilmiah yang telah menyajikan ulasan tentang hubungan antara agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israeal Bersatu seperti tulisan Robert B. Coote, Mary Coote, David R. Ord, dan Norman K. Gottwald yang menjelaskan tentang

¹ Wasisto Raharjo Jati, *Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama*, Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 1, Mei 2014: 133 – 156. <https://journal.walisongo.ac.id>.

² Ibid.

³ Ibid.

adanya pengaruh besar politik dinasti terhadap konstruksi teks-teks kitab suci⁴ maupun tulisan dari Franz Magnis Suseno, Richard M. Daulay, John A. Titaley, Ridwan,⁵ dan Yati Nurhayati⁶ yang menjelaskan adanya hubungan erat antara entitas agama dan politik pada konteks negara Indonesia sehingga melahirkan unsur-unsur dasar negara yang tertulis. Tetapi dari semua tulisan tersebut belum terdapat tulisan hasil penelitian yang berusaha untuk mengkaji hubungan antara politik dan agama dalam perbandingan antar kedua konteks di atas. Kajian tentang perbandingan hubungan antara agama dan politik dalam kedua konteks di atas menjadi persoalan penting dan strategis. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai luhur yang dikonstruksi dalam butir-butir dasar negara Indonesia merupakan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh konstruksi teks-teks keagamaan yang dilahirkan dari rahim masyarakat yang berhubungan dengan agama samawi khususnya Kerajaan Israel Bersatu (dinasti Daud). Dengan demikian untuk memahami secara mendalam hubungan antara agama dan politik dalam konteks Indonesia, maka diperlukan pula suatu pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara agama dan politik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu (dinasti Daud).

Sehubungan dengan latar belakang dinamika hubungan antara entitas agama dan politik di atas, maka tulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang eksplisit menyangkut pertanyaan tentang “bagaimana perbandingan sosio-historis hubungan antara agama dan politik baik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun Indonesia sebagai sebuah negara modern?” Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan hubungan yang mendasar antara agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun pada konteks negara Indonesia sebagai sebuah negara modern dengan dasar negara Pancasila dan realita kebhinekaannya.

Metode

Pada proses penulisan artikel ini, metode penulisan yang digunakan dalam menyajikan isi materi artikel adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipahami sebagai suatu model penelitian yang mendeskripsikan data penelitian berdasarkan pada suatu sumber data primer dengan latar alamiah. Sedangkankan pendekatan dasar yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hermeneutik melalui penelitian kepustakaan.⁷ Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun atau mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-sumber yang anggap sesuai atau memiliki manfaat bagi suatu topik kajian penelitian.⁸ Informasi yang dimaksud oleh peneliti adalah berbagai sumber informasi yang diperoleh dari berbagai referensi sumber tertulis seperti internet, buku tafsiran, buku teks, buku digital, ensiklopedi, jurnal, makalah atau sumber-sumber tertulis lainnya.⁹ Hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif guna mendapatkan hasil pembahasan yang bersifat komprehensif terhadap perbandingan hubungan antara agama dan politik pada dua konteks sosial masyarakat yang berbeda zaman. Analisis deskriptif tersebut melibatkan

⁴ Lihat Normana K. Gottwald, *The Politics of Ancient Israel* (Louisville-Kentucky: Westminster John Press, 2001).

⁵ Ridwan, “Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna,” <https://media.neliti.com>, Vol. 12, no. 2 (2017): 223 – 236.

⁶ Yati Nurhayati, “Posisi Agama Dalam Ranah Politik Di Indonesia,” <https://www.neliti.com>. Vol. 5, no. 9 (2013): 14–21.

⁷ Nasokhili Giawa, “Kepemimpinan Nehemia Dan Relevansinya Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Di Indonesia.,” *Jurnal Jireh* 1, no. 2 (2019).

⁸ Osian Orjumi Moru, “Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian.,” *Jurnal Kenosis* 7, no. 2 (2021): 219–244.

⁹ Ibid.

pendekatan sosio-historis yang memperhatikan fakta-fakta sejarah yang terjadi baik pada konteks negara Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu. Pada akhirnya tulisan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan penelitian tentang fakta-fakta sosial perbandingan hubungan antara agama dan politik baik pada konteks Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi modern yang berdasarkan Pancasila maupun pada konteks Kerajaan Israel Bersatu sebagai negara dinasti politik yang bersifat teokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Relasi Agama dan Politik

Relasi konseptual antara entitas agama dan politik merupakan relasi hubungan sosial yang menempati sejarah panjang umat manusia. Muncul dan berkembangnya berbagai perdebatan dan teori konseptual dari ragam latarbelakang keilmuan, menegaskan bahwa entitas agama dan politik menjadi isu problematik sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi jika di petakan ke dalam ruang lingkup linearitasnya, maka secara umum pemikiran tentang hubungan antara entitas agama dan politik mengacu kepada dua konsep dasar yang secara diametris bertentangan. Pertama adalah ide atau gagasan yang “melibatkan” atau “mengampayekan” agama sebagai bahagian dari pertimbangan atau unsur penting dalam setiap keputusan politik dan kekuasaan negara. Gagasan tentang hubungan antara entitas agama dan politik yang bersifat “saling mempengaruhi” ini kemudian dikenal dengan istilah “teokrasi” atau pemerintahan berbasis agama.¹⁰ Teokrasi menempatkan sejarah pembentukan suatu negara dengan segala urusan politiknya sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Pada dasarnya teori ini memegang prinsip kedaulatan Tuhan sebagai dasar pembentukan suatu negara dan landasan hukum atau moralitas suatu pemerintahan. Paham teokrasi berkembang secara pesat sebagai akibat dari pergolakan politik abad pertengahan, dimana terdapat kaum *mobarchomach* yang berpendapat bahwa setiap kekuasaan seorang raja pasti bersumber atau diperoleh dari Tuhan. Teori ini kemudian berkembang ke dalam dua teori dasar yang dikenal sebagai teori teokrasi langsung dan teori teokrasi tidak langsung. Teori teokrasi langsung atau primitif menjelaskan tentang kehendak Tuhan sebagai dasar munculnya atau terbentuknya suatu negara beserta berbagai urusan politiknya. Sedangkan teori teokrasi tidak langsung menempatkan raja atau penguasa sebagai alat atau perpanjangan tangan Tuhan dalam membentuk dan memerintah suatu negara bersama seluruh urusan politiknya. Seorang raja berkuasa atas nama Tuhan.¹¹

Kedua, terdapat gagasan tentang hubungan antara entitas agama dan politik pada ruang independensi sosial. Pada konteks gagasan ini, setiap diskursus publik harus dipisahkan dari dinamika doktrinasi dan ruang konseptual dalil agama. Agama dipandang sebagai urusan privat yang menggambarkan relasi humanis manusia dengan Penciptanya, yang dipisahkan dengan berbagai urusan politik dan kekuasaan. Pada taraf ini, dimensi agama dilihat sebagai ruang supraempiris antara manusia dengan “Yang Ilahi”, sedangkan politik dianggap sebagai ruang empiris sosial masyarakat. Konsep relasi sosial antara agama dan politik ditempatkan pada dua porsi yang berbeda sehingga terjadi proses pemisahan yang tegas antara kedua entitas tersebut. Pada titik ini, agama tidak lagi berhubungan dengan berbagai urusan politik kekuasaan suatu masyarakat ataupun sebaliknya.

Bentuk pemisahan antara keputusan politik suatu kekuasaan dan dalil-dalil agama suatu masyarakat, merupakan cara penempatan agama dalam porsi yang eksklusif dan sekularistik. Proses penempatan ini ingin memastikan segala bentuk keputusan dan dalil

¹⁰ Samsul Ma'arif, “Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason),” *Jurnal UGM* 16, no. 2 (2006): 189–201.

¹¹ Resti Vani Yuliranza, “Dalam Teori-Teori Yang Memberi Dasar Negara Hukum Bagi Kekuasaan Negara,” last modified 2017, accessed January 1, 2022, <http://osf.io>.

politik suatu negara tidak dipengaruhi oleh dalil agama atau sebaliknya. Diktum-diktum keagamaan menjadi ruangan dengan otonomi khusus sehingga segala bentuk dalil agama memainkan peranan sosialnya secara eksklusif dan otonom. Pada tingkat ini, suatu masyarakat telah mengalami transformasi sosial dari ikatan sosial masyarakat yang mekanis kepada ikatan organis.

Kedua dalil yang bersifat kontras diatas, kemudian berkembang dengan memunculkan suatu konsep baru tentang hubungan antara agama dan politik yang berada pada ruang lingkup yang lebih moderat. Konsep hubungan antara agama dan politik di tempatkan pada titik *intersectional* dimana persinggungan antara agama dan politik terjadi hanya pada posisi-posisi dan porsi-porsi tentu. Pada konteks ini, segala urusan politik tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan dalil agama melainkan bersifat parsial. Seperti sebuah bentuk metamorfosis yang panjang, proses *intersectional* atau ketersinggungan antara agama dan politik berkembang dari konsep saling mempengaruhi atau tidak saling mempengaruhi menjadi saling melengkapi.

Jalan moderasi yang ditempuh dalam urusan hubungan antara agama dan politik, menjadi titik balik konseptual yang penting dalam melihat ruang lingkup pengaruh agama maupun pengaruh politik dalam konteks hubungan sosial masyarakat yang telah mengalami transformasi. Jalan moderasi merupakan jalan sejarah yang menempatkan urusan agama dan urusan politik pada konteks yang lebih harmoni dan adaptif dibanding konsep lama yang bersifat transaksional atau otonom. Baik urusan agama maupun urusan politik dipandang memiliki porsi masing-masing yang penting dan proporsional dalam konteks konstruksi rajutan sosial suatu masyarakat.

Konsep teoritis menyangkut relasi antara entitas agama dan politik juga dapat ditelaah menurut teori John Rawls tentang *Public Reason* dalam teori keadilan. *Public Reason* banyak diungkapkan oleh Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" dan "*Political Liberalism*". *Public Reason* merupakan suatu gagasan tentang masyarakat demokratis atau *well-ordered constitutional democratic society*.¹² *Public Reason* merupakan kondisi dari suatu komunitas masyarakat yang tiap anggotanya dapat diterima dan menerima konsepsi politik yang sama tentang keadilan.¹³ Pada konteks ini, *Public Reason* berusaha untuk menjamin kemampuan setiap anggota masyarakat untuk berargumen secara fair dan tidak ada tendensi dominatif satu terhadap yang lain.¹⁴

Public Reason merupakan ide yang menempatkan kesetaraan sebagai konsensus bersama dalam mendorong kepentingan fundamental publik yang disebut sebagai "reasonable". Rawls mengemukakan konsep tentang kesetaraan dan keadilan publik ini harus merupakan konsep diskursus publik yang berdasarkan "*fairness*". *Fairness* merupakan prinsip yang diterima oleh individu-individu yang bebas dan rasional untuk kepentingan dalam posisi asali (*original position*). Posisi asali merupakan suatu status quo yang menegaskan adanya kesepakatan bersama tentang kondisi "*fair*". Posisi "*fair*" merupakan posisi setiap individu dalam hal hak-hak dasar kemanusiaannya tanpa adanya diskriminasi. Pada posisi ini, "*Fairness*" merupakan suatu pengertian rasional tentang cara yang paling baik dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

¹² John Rawls, *The Idea of Public Reason Revisited Dalam Samuel Freeman (Ed), John Rawls Collected Papers*. (Cambridge: Harvard university Press, 2001), 573.

¹³ Samsul, "Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason)".

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Persepektif Keindonesiaan.," *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 25-37.

Tujuan bersama merupakan suatu hasil konsensus dalam upaya untuk mendorong adanya kesetaraan yang bersumber dari gagasan intuitif yang implisit terhadap dogtrin komprehensif.¹⁶ Pada titik inilah, Rawls mendefinisikan dan mengelaborasi konsep *Public Reason* yang pernah diperkenalkan oleh Immanuel Kant dalam tiga prinsip dasar keadilan yakni *principle of greatest equal liberty*, *the difference principle*, dan *the principle of fair equality of opportunity* sebagai landasan utama grand teorinya.¹⁷ *Public Reason* merupakan bagian penting dan integral dalam setiap masyarakat plural. *Public Reason* pada akhirnya berhubungan dengan reaksi terhadap norma dan kepentingan publik yang mengatur tatanan hidup bersama dalam suatu negara.

Pada konteks pemikiran tentang relasi entitas agama dan politik, *Public Reason* menjadi alasan mendasar yang mencari titik temu atau konsensus bersama dalam mempersatukan perbedaan ide dari bermacam-macam orang yang terikat pada satu kontrak sosial bersama. *Public Reason* merupakan bentuk *intersectional* dari berbagai kepentingan agama dan politik dalam suatu masyarakat yang bersifat plural. Bentuk *intersectional* yang demikian pada akhirnya akan mendorong lahir dan berkembangnya suatu dasar konstitusi negara yang menjadi fondasi kehidupan bersama warga negara.

Uraian diatas menggambarkan adanya dinamika hubungan konseptual antara entitas agama dan politik yang bersifat kompleks. Relasi sosial antara entitas agama dan politik menjadi relasi yang bersifat resiprokal pada berbagai lapisan struktur sosial masyarakat yang berkembang dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Perubahan adaptif yang terjadi dalam relasi sosial antara entitas agama dan politik menjadi dasar konseptual yang kontekstual bagi keberlangsungan dan kemajuan ikatan sosial masyarakat yang terikat pada satu kontrak sosial bersama.

Hubungan antara entitas agama dan politik dalam ranah kekuasaan atau suatu pemerintahan merupakan perjumpaan yang didasarkan kepada bentuk elaborasi kepentingan-kepentingan sektoral maupun publik. Kepentingan-kepentingan tersebut kemudian terkristalisasi ke dalam suatu kesepakatan bersama sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai sosial masyarakat. Pada akhirnya relasi antara entitas agama dan politik akan mempengaruhi kualitas hubungan sosial masyarakat dan kehidupan bernegara suatu bangsa dari masa ke masa.

Sejarah Relasi Agama dan Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman sosial-kultural kompleks. Keragaman itu tidak saja menyangkut suku, budaya dan letak geografis tetapi juga menyangkut agama dan kepercayaan masyarakatnya. Keragaman agama dan kepercayaan tersebut merupakan ciri khas keindonesiaan yang menampilkan keunikan dan pesona masyarakat Indonesia pada tingkat global. Sekalipun Indonesia bukanlah negara agama, keberadaan agama menjadi hal yang menduduki porsi penting dalam percaturan politik nasional. Hal ini terlihat jelas dalam sejarah panjang dinamika kehidupan berbangsa yang melibatkan berbagai pergolakan dan propaganda isu-isu agama dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Hubungan pengaruh antara agama dan pergolakan politik nasional di Indonesia, telah ada sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Persinggungan kepentingan-kepentingan politik dengan urusan-urusan agama, menjadi pemandangan lumrah dalam dinamika kehidupan bernegara dan berbangsa pada berbagai tingkat lapisan sosial masyarakat. Dinamika hubungan sosial antara kepentingan-kepentingan politik dengan

¹⁶ John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1996), 144.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973), 10.

urusan-urusan agama menjadi kebiasaan yang terpolarisasi dalam setiap momentum peristiwa perpolitikan di Indonesia.

Pada catatan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, arus kekuatan unsur-unsur keagamaan lahir dan berkembang bersama dengan munculnya kekuatan kekuasaan politik kerajaan-kerajaan besar di tanah air. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa secara politik di wilayah Indonesia, tidak saja menampilkan unsur-unsur kultural yang menonjol tetapi juga pengaruh tokoh-tokoh agama dan ajaran-ajaran doktrinal yang kental pada periode pemerintahannya. Sebut saja kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari dan Majapahit yang kental dengan ajaran agama Hindu maupun kerajaan Sriwijaya yang kental dengan corak Budha atau kerajaan Demak, Samudra Pasai, Mataram, Gowa, dan lain-lain yang bercorak Islam. Eksistensi kerajaan-kerajaan tersebut merupakan cermin keintiman hubungan antara unsur-unsur entitas agama dengan politik pada masa pra-Indonesia yang berpengaruh luas pada pembentukan dasar-dasar ideologi bangsa Indonesia di kemudian hari.

Hubungan keintiman antara entitas agama dan politik di Indonesia, juga nampak jelas pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15. Pada masa tersebut, negara-negara penjajah seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda juga menunjukkan upaya percampuran sistematis antara misi agama dan kekuasaan politik. Hal ini nampak jelas pada agenda besar bangsa-bangsa Eropa masa itu yang berusaha melakukan misi kolonialisasi antara benua demi menyukkseskan slogan 3G yakni *gold, glory, dan gospel*. Misi kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa yang menembus seantero penjuru dunia merupakan bukti catatan sejarah yang menampilkan kesuksesan percampuran antara unsur entitas agama dan politik. Pada masa ini keintiman antara entitas agama dan politik menjadi isu sentral dari misi pemerintahan bangsa-bangsa Eropa yang bersifat teokrasi.

Percampuran misi yang di bawah oleh bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada masa imperialisme dan kolonialisme tersebut, kemudian berdampak luas bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Jejak sejarah percampuran misi antara agama dan politik di Indonesia yang dibawah oleh negara-negara Eropa sejak abad ke-15, terlihat dari sejumlah peninggalan sejarah seperti produk konstitusi, bangunan bersejarah, sampai struktur ketatanegaraan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya sampai saat ini. Periode imperialisme dan kolonialisme mendorong semakin kokohnya proses tumpang tindih misi antara unsur-unsur agama dan politik dalam segenap aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pada masa pasca-kolonial, perjumpaan antara entitas agama dan politik terus berkembang secara dimanis bahkan antagonistik sebagai akibat dari berbagai pergeseran konteks hubungan antar agama.¹⁸ Segera setelah negara Indonesia didirikan, problem hubungan antara entitas agama dan politik terus berkembang dengan adanya keinginan kuat dari kelompok-kelompok Islam tertentu untuk mendorong pelaksanaan syari'at Islam sebagai dasar negara (*weltanschauung*) dan aturan perpolitikan yang sah di Indonesia.¹⁹ Aturan perpolitikan yang ingin dilakukan berdasarkan syari'at Islam oleh sekelompok pendukung ideologi agama melalui penerapan Piagam Jakarta, pada akhirnya akan menghasilkan pola politik identitas kepala negara yang juga harus beragama Islam.²⁰

¹⁸ Siti Jahroh, "Politik Keagamaan Di Indonesia: Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *In Right (Jurnal Agama dan Ha Azazi Manusia)*, Vol. 1, no. 1 (2011): 218-239.

¹⁹ Siti, "Politik Keagamaan Di Indonesia: Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia".

²⁰ Osian Orjumi Moru, "Mereposisi Hubungan Antara Agama Dan Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen.," *Jurnal Taruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 118-132.

Konsekuensi ini berbenturan dengan semangat nasionanisme dari pendukung kubu nasionalis yang menghendaki adanya persatuan negara Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Negara yang diidam-idamkan oleh para tokoh nasional yang beraliran nasionalis saat itu adalah bagaimana menciptakan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan bagi seluruh golongan dan segenap lapisan sosial rakyat Indonesia. Akibatnya, pada masa persidangan awal BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyoningrat terjadi begitu banyak perdebatan antara kubu nasionalis dan kelompok Islam tradisional. Perdebatan-perdebatan tersebut berujung dengan munculnya konsensus bersama yang ditawarkan oleh Soekarno tentang "Pancasila" sebagai dasar negara yang kemudian dirumuskan ulang oleh tim sembilan dalam bentuk rumusan akhir yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945.²¹ Rumusan ini kemudian menjadi dasar penting bagi peta relasi antara agama dan politik di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Indonesia secara politik dalam bingkai negara kesatuan yang berbeda dengan negara agama. Melalui konsensus Pancasila, Indonesia menjadi negara demokrasi yang mengadopsi nilai-nilai luhur agama sebagai pedoman ketatanegaraannya. Pancasila merupakan produk sejarah politik Indonesia yang menempatkan urusan agama dan politik secara proporsional sehingga dapat menghasilkan kesatuan dan persatuan masyarakat yang bersifat multikultural.

Penempatan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada butir pertama Pancasila, merupakan konsensus bersama para *founding father* untuk menegaskan garis *intersectional* yang tegas antara urusan agama dan urusan politik dalam ruang-ruang publik warga negara. Melalui Pancasila dan UUD 1945, eksistensi dalil-dalil agama diakomodasi secara cermat dalam upaya menciptakan harmonisasi nilai-nilai kultural yang bersifat plural. Sila pertama pancasila dan konstitusi negara pada pasal 29 UUD 1945, mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang bersifat multikultural tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan yang dianut oleh segenap masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi alat untuk menghambat atau meminimalisir berbagai bentuk polarisasi sosial dan konflik sosial masyarakat sebagai akibat perbedaan identitas agama dan politik.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa selalu berhubungan dengan berbagai dinamika relasi antara entitas agama dan politik. Dengan penempatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, tidak kemudian membuat proses tarik-menarik kepentingan antara urusan agama dan politik terhenti. Dari masa pra-kemerdekaan sampai masa kini, sentuhan bahkan benturan antara kepentingan urusan agama dengan urusan politik semakin terasa memuncak. Perihal ini dapat dilihat pada dinamika konflik sosial masyarakat sebagai akibat dari proses politik seperti pemilihan presiden, pemilihan partai politik, pemilihan kepala daerah bahkan sampai intrik politik dibalik pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara. Persoalan agama dan kepercayaan selalu menjadi indikator penting dalam menentukan arah praktek politik diantara dinamika perpolitikan nasional. Hal ini tidak kemudian menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasi Pancasila dan UUD 1945 dalam ranah empiris masyarakat, tetapi kenyataan tersebut justru memperlihatkan bahwa relasi antara agama dan politik akan selalu menjadi relasi yang bersifat *intersectional* baik pada taraf ideologi maupun implementasi dilingkungan empiris masyarakat.

Sejarah panjang hubungan antara agama dan politik di Indonesia menunjukkan pentingnya pengaruh kedua entitas tersebut dalam menentukan keunggulan dan kemenangan dari tokoh-tokoh bangsa yang bertarung memperebutkan pengaruh dan kekuasaan pada tingkat regional maupun nasional. Berbagai isu menyangkut agama selalu

²¹ Ibid.

menjadi isu “seksi” yang diangkat dalam berbagai pertarungan politik para elit bangsa seperti yang tercermin jelas dalam kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Kontestasi politik yang terjadi di DKI Jakarta telah mempertontonkan politik identitas yang kental sebagai alat ampuh dalam memperoleh simpati publik. Adanya pengaruh besar tokoh-tokoh agama dan para pemeluk agama di Indonesia, telah mempermudah terjadinya perkawinan antara entitas agama dan politik sebagai simbol adanya tarik menarik kepentingan yang kuat antara kelompok-kelompok politik, agama dan kekuasaan.

Sebagai negara dengan masyarakat yang berlatarbelakang identitas agama yang kental, telah membuat politik praktis di Indonesia menjadi sangat rentang dengan urusan dan kepentingan agama. Walaupun Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, namun dikotomi sosial antara kaum mayoritas dan minoritas tetap terlihat secara kasat mata dalam berbagai kontestasi politik secara nasional. Meski dikotomi antara kaum mayoritas dan minoritas tidak dapat dibenarkan secara konstitusi negara, namun fakta empiris menunjukkan bahwa isu tersebut menjadi isu populer dalam berbagai dimensi sosial masyarakat. Fakta bahwa negara Indonesia bukan negara agama tidak serta merta menghilangkan keintiman hubungan antara agama dan kepentingan politik dalam catatan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hubungan antara entitas agama dan politik di Indonesia akan selalu menjadi relasi dua entitas yang bersifat *intersectional* dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat.

Agama dan Politik Pada Masa Kerajaan Israel Bersatu

Hubungan kedekatan antara entitas agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu, menunjukan suatu pertalian asosiatif yang bersifat kompromistis dan akomodatif. Sifat kompromistis dan akomodatif tersebut, tergambarkan dalam pola pemerintahan dinasti Kerajaan Israel Bersatu yang menggunakan unsur-unsur entitas agama dalam melegalisasi dan melegitimasi proses politik pemerintahan yang bersifat sentralistik. Disebut demikian sebab hubungan fenomena sosial antara entitas agama dan politik menjadi hubungan yang mengalami berbagai bentuk transformasi multikultural pada berbagai dimensi kehidupan bernegara di Kerajaan Israel Bersatu.

Sejarah kedekatan hubungan antara entitas agama dan politik pada masa Kerajaan Israel Bersatu dimulai sekitar tahun 1.300 - 1.200 SZB. Pada periode tersebut, proses asosiatif entitas agama dan politik nampak jelas dengan munculnya suatu bentuk konfederasi suku-suku penyembah Yahweh yang merupakan kombinasi antara kekuatan-kekuatan kelompok sosial seperti petani, pengembala, bandit (militer), tukang, imam, termaksud kelompok yang melarikan diri dari Mesir sebagai akibat adanya proses revolusi sosio-religius.²² Keintiman antara kedua entitas tersebut terus mengalami berbagai proses asosiatif yang lebih bersifat sentralistik dan intens dengan terbentuknya monarki baru dari liga suku-suku di Palestina pada sekitar tahun 1.000 - 931 SZB yang dikenal sebagai Kerajaan Israel Bersatu.

Dengan mundur dan melemahnya pengaruh kekuatan-kekuatan besar yang menguasai Palestina seperti bangsa Het dan Mesir, telah membuat kondisi sosial-politik di Palestina mengalami perubahan secara fundamental. Kekuatan-kekuatan suku yang semula terdiferensiasi dalam lingkungan geografis dan kultural masing-masing, telah bangkit menjadi suatu pusat kekuatan bersama yang dipimpin oleh kepala-kelapa suku seperti Saul dari suku Benyamin yang mengklaim hak istimewanya atas wilayah Palestina.²³ Pusat

²² SZB adalah masa "Sebelum Zaman Bersama" atau Sebelum Masehi (SM)...Lihat juga tulisan Norman K Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction* (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 600.

²³ Robert B. Coote & Mary P. Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 31.

kekuatan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Israel tersebut dibentuk oleh jaringan politik keluarga-keluarga yang persatukan karena adanya berbagai ancaman sosial baik secara eksternal maupun internal.²⁴ Keluarga-keluarga ini kemudian memunculkan adanya kampanye-kampanye politik yang menuntut pengakuan terhadap kesederajatan atau egalitarian pada status sosial mereka.

Pada beberapa tulisan *hieroglyphic*, menunjukan adanya persaingan politik antara kekuatan kekuasaan-kekuasaan di Palestina yang terus berkembang dengan memunculkan ikatan pengaruh sosial yang lebih intens antara entitas agama dan entitas politik. Kekuatan suku-suku yang semula terorganisir secara terpisah-pisah dalam lingkup geopolitik lokal, berkembang secara dramatis dengan terbentuknya pusat kekuasaan baru secara nasional yang mengembangkan bentuk integrasi masif antara entitas agama dengan entitas politik baik secara administrasi maupun secara ideologi. Bentuk integrasi struktural tersebut terlihat secara menonjol dalam peta perpolitikan nasional baik dalam ranah pembangunan fisik maupun dalam pola pengambilan keputusan penguasa baru baik dalam lingkup regional maupun global.

Sejak awal terbentuknya dinasti baru di Palestina yang dikenal sebagai Kerajaan Israel Bersatu, Daud sebagai penguasa pertama dinasti tersebut menarik dukungan kekuasaan politik tidak saja berasal dari pengaruh kekuasaan negara asing dan kekuasaan tuan-tuan tanah lokal tetapi juga merekonstruksi struktur dan pola agama-agama lokal dalam bentuk yang lebih sentralistik untuk menarik dukungan rakyat terhadap kekuasaan baru dan kepemimpinannya. Daud berhasil mengembangkan suatu konsep hidup bernegara yang populer dengan melaraskan kebijakan-kebijakan politik dengan intrik-intrik keagamaan. Daud dapat memelihara kekuasaan kerajaannya terhadap suku-suku di dataran tinggi dengan mengizinkan hukum adat dan tradisi kepercayaan lokal memainkan peranan penting dalam dinamika kekuasaan nasional.²⁵

Menurut Coote, kerajaan Daud yang baru cenderung mendapatkan dukungan besar dari rakyat atau suku-suku di Palestina sebab ia mengembangkan pola-pola tradisi hukum adat yang memiliki hirarki dan fungsi yang sejajar dengan hukum negara.²⁶ Hal ini terlihat jelas pada upaya Daud dalam mengatur dinamika keagamaan yang terjadi diantara suku-suku Palestina dengan mengangkat dan menempatkan dua orang imam besar yang secara politik memiliki pengaruh besar bagi kekuasaannya. Imam Abyatar dari wangsa Eli²⁷ memiliki tugas dalam mengendalikan dinamika sosial keagamaan bagi suku-suku di wilayah utara dan Zadok sebagai imam yang bertanggungjawab atas urusan keagamaan di wilayah selatan. Dengan mengangkat dan menempatkan kedua imam besar pada struktur kepemimpinan dinastinya, Daud berupaya memastikan adanya dukungan politik dari masyarakat yang hidup berdasarkan pengaruh tradisi keagamaan yang kuat. Daud berupaya untuk mengontrol dinamika politik dan sosial melalui dinamika tradisi kultus dan keagamaan. Hal ini berakibat pada adanya pengaruh besar administrasi kultus dan keagamaan terhadap administrasi negara.

Propaganda kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Kerajaan Israel Bersatu, tidak saja berhubungan dengan dinamika kekuasaan para tokoh keagamaan diantara suku-suku di Palestina, tetapi juga dengan upaya pembentukan narasi kesusastaan negara yang menjadi dasar propaganda politik penguasa. Propaganda politik-keagamaan pada masa Kerajaan Israel Bersatu nampak jelas dengan adanya pembentukan tradisi sumber Y atau sumber Yahwist dalam sejarah TANAK. Menurut Prof. John Titalley dalam Coote dan Ord,

²⁴ Ibid., 27.

²⁵ Ibid., 33.

²⁶ Ibid., 34.

²⁷ Ibid.

sumber Y merupakan agenda penting Daud dalam upaya untuk mendudukkan kerajaan barunya diantara kerajaan-kerajaan besar yang telah berkuasa saat itu. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan narasi dalam sumber Y untuk meyakinkan rakyat di Palestina bahwa Israel adalah bangsa yang besar, dipilih dan diberkati. Kerajaan Israel bersatu merupakan anak sulung Yahweh yang diberkati jika dibandingkan dengan anak sulung Ramses yang mati di Mesir karena tidak dapat berhadapan dengan kekuasaan Yahweh.²⁸ Berdasarkan konsep dasar dalam narasi sumber Y ini, terlihat jelas adanya upaya penguasa kerajaan baru dalam merekonstruksi kepercayaan rakyat di Palestina sebagai sarana atau upaya penting dalam mendukung agenda propaganda politik dan kekuasaan penguasa baru di wilayah selatan.

Tak dapat disangkal bahwa sumber Y merupakan sumber yang memiliki agenda politik yang berhubungan dengan upaya melegitimasi kekuasaan penguasa baru dan upaya untuk menarik kesetiaan sheik-sheik suku di Negeb dan Sinai yang merupakan pendukung Daud dalam melawan Kerajaan Mesir.²⁹ Narasi sumber Y dibentuk berdasarkan tema-tema pokok tertentu yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kerajaan baru dibawah kepemimpinan Daud. Menurut Coote dan Ord,³⁰ sumber Y tersusun atas lima sumber berbeda yakni pertama, teks yang seolah-olah teks standar pengadilan Akkadia, khususnya Atrahasis,³¹ kedua, tradisi pengadilan Kanaan menyangkut budaya garis keturunan, ketiga, tradisi menyangkut para leluhur Israel dan kerabat mereka, berfokus pada Hebron dan Bersyeba, keempat, tradisi menyangkut nama tempat atau pranata yang dibentuk menurut nama Israel dan anak-anaknya terkait dengan hubungan di antara suku-suku dan segi politik Israel bersama negara berkuasa di sekitarnya, kelima, komposisi puisi pendek dan kemungkinan bersifat independen dari asal-usul kerakyatan yang berbeda. Kelima sumber yang berbeda-beda ini, kemudian dipersatukan pada satu tujuan yang sama untuk mengangkat tiga tema utama dalam narasi sumber Y yang eksklusif.

Tiga tema besar itu yakni pertama, tema tentang berkat dan kutuk yang muncul dalam berbagai narasi teks-teks TANAK terutama pada konsep silsilah dengan berbagai narasi disekitarnya. Dari tema ini terlihat jelas adanya suatu bentuk defensi sosial yang dibatasi oleh suatu garis tegak lurus yang memisahkan antara *genealogy urban culture* dan *herding culture*. Pada intinya, narasi yang cenderung mendikotomi dua bentuk genealogi di atas memiliki semacam tujuan yang diduga berhubungan dengan nuansa politis yakni bentuk legitimasi kekuasaan para penguasa Israel dalam hubungannya dengan narasi-narasi kultus keagamaan.³² Kedua adalah tema yang muncul dalam hubungan dengan hak istimewa. Tema ini diduga memiliki keterkaitan dengan posisi sosial Daud sebagai seorang anak laki-laki yang tidak berada pada posisi strategis (menyangkut hak kesulungan) dalam mendukung hak politiknya sebagai seorang raja pada masa itu. Perlihatkan status sosial dari anak sulung ke anak bungsu dalam narasi sumber Y, memiliki peranan sosial penting dalam merubah persepsi kultural masyarakat yang cenderung bersifat hirarkis dan eksklusif. Pada posisi ini narasi teks keagamaan (sumber Y), diduga telah direkonstruksi sedemikian rupa oleh ahli sastra istana agar menjadi narasi teks yang menyokong legitimasi politik dinasti

²⁸ Robert B. Coote & Ord, *Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y* (Jakarta: BPK Gunung Mulian & UKSW, 2015), 8.

²⁹ Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, 36.

³⁰ Coote, *Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y*, 18.

³¹ Bandingkan dengan Niditch (2005: 285), dan juga Van Der Thom (2007: 109-141) menyajikan perbaikan atas hubungan mereka; sebagai kontras terhadap dukungan penuh yang diberikan untuk perbedaan yang melekat dalam Carr 2005.

³² Lihat Robert B. Coote dan Ord, *Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y ...*, 137-161. Bandingkan dengan Osian Orjumi Moru, Dkk, *Perjanjian Lama dan Konteksnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 8-9.

Daud.³³ Ketiga, Konsep tentang perjanjian. Tema ini muncul dalam narasi tradisi sumber Y yang berhubungan dengan cerita perjanjian antara Yahweh dengan para leluhur orang Israel. Pada narasi sumber Y, konsep tentang perjanjian diduga telah direkonstruksi sedemikian rupa hingga memiliki serangkaian cerita yang mengungkapkan kemurahan hati Yahweh terhadap para leluhur suku-suku Israel. Konsep tentang perjanjian berkat, diduga telah memposisikan darat sosial suku-suku Israel dalam posisi “umat pilihan yang khusus” diantara bangsa-bangsa yang lain. Posisi sosial yang penting tersebut pada akhirnya akan membawa kekuasaan bangsa pilihan ini kepada suatu daya tawar politik yang besar, baik pada tingkat persaingan kekuasaan regional maupun global. Pada titik ini, konsep tentang perjanjian dalam sejarah leluhur orang Israel telah menjadi konsep narasi yang memainkan peranan secara dwifungsi dan mengelaborasi hubungan antara entitas agama dengan entitas politik pada konteks sejarah sumber Y.³⁴

Dengan melakukan serangkaian propaganda narasi keagamaan diatas, Daud menempatkan posisi politiknya pada tingkat popularitas sosial yang tinggi. Daud berhasil menarik simpati dari berbagai pihak dalam upaya melegalisasi dan melegitimasi kekuasaan pada periode ancaman eksternal yang kuat. Daud berhasil membangun fondasi kekuasaan yang kuat atas suku-suku Israel di Palestina dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan politik yang lunak untuk tujuan yang lebih visioner dibandingkan pendahulunya.

Keberhasilan Daud dalam mengelaborasi entitas agama dan politik dalam kancah persaingan kekuatan global, menjadi titik tolak keberhasilan dinasti Daud yang diikuti oleh Salomo sebagai sang penerus tahta kerajaannya. Salomo menegaskan otoritas kekuasaannya atas Kerajaan Israel Bersatu melalui persaingan politik-keagamaan yang kental. Meskipun Salomo lahir pada urutan kesepuluh dalam pewaris tahta Daud, ia berhasil melompati antrian kakaknya Adonia sebagai pewaris tahta yang sah menurut tradisi suku-suku di Palestina. Salomo berhasil menduduki tahta kekuasaan setelah mendapat dukungan dan promosi dari empat laki-laki tua yang memiliki otoritas dan pengaruh penting dalam kerajaan Daud yakni Zadok, Benaya, Natan, dan Adoram. Empat laki-laki tua tersebut, tidak saja mewakili tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kekuasaan yang besar dalam istana Daud tetapi juga menunjukkan nuansa perkawinan politik-keagamaan yang kental dalam mendukung lahirnya sosok penguasa baru dalam dinasti Daud.³⁵

Perkawinan antara dukungan tokoh politik dan tokoh agama dalam dinasti Daud terhadap Salomo, menegaskan jalan kekuasaan yang dipilihnya selama masa pemerintahan empat puluh tahun. Salomo berhasil membangun simbol kekuasaan atas Palestina berupa istana megah yang dibangun selama tiga belas tahun dan memperkokoh status pengaruh keagamaan terhadap kebijakan politiknya melalui pendirian pusat kultus baru (Bait Allah) dibawah perlindungan kerajaan di Yerusalem.³⁶ Salomo berhasil memainkan politik-keagamaan dalam menarik dukungan yang kuat terhadap pemerintahannya, baik secara internal maupun eksternal. Politik keagamaan yang berhasil dielaborasi oleh Salomo tidak saja menyangkut penempatan tokoh-tokoh agama pada posisi strategis kekuasaan istana tetapi juga menguasai hubungan yang kondusif dengan penguasa-penguasa asing dan para parther dagang kerajaannya, melalui perizinan pelaksanaan kultus asing di

³³ Coote, *Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y*, 101-136, 254-299. Bandingkan dengan Moru., 9-10.

³⁴ Ibid., 188-253. Bandingkan dengan Moru., 9.

³⁵ Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, 40.

³⁶ Ibid., 42-43.

kerajaannya.³⁷ Sejarah diplomatis yang kuat ini, menegaskan alasan kondusifitas kekuasaan Salomo selama empat puluh tahun dari ancaman kekuatan-kekuatan asing disekitar wilayah Palestina.

Secara internal, Salomo berhasil membangun pusat kultus bait suci yang menjadi sumber hukum dan peraturan bagi kerajaannya. Kultus suci di Yerusalem tersebut tidak saja menjadi tempat untuk menyelenggarakan ibadah dan perayaan-perayaan keagamaan yang besar tetapi juga sebagai pengadilan, tempat harta benda, dan tempat penyimpanan arsip tulisan-tulisan penting menyangkut hukum dan sejarah bangsa Israel.³⁸ Bait suci menjadi tempat strategis dalam mempersatukan unsur-unsur entitas agama dan entitas politik dalam mendukung kesuksesan program-program nasional yang dikampanyekan oleh para penguasa di Yerusalem. Bait suci tidak saja menjadi simbol penyembahan terhadap satu entitas tunggal, tetapi juga menjadi simbol persatuan suku-suku di Palestina yang tersentralisasi dari berbagai ragam unsur kultural yang berbeda-beda.

Salomo berhasil memperkokoh dan memperluas pengaruh kekuasaan dinasti Daud yang tidak saja terbatas pada suku-suku di selatan tetapi juga wilayah subur di utara. Salomo mengembangkan suatu negara yang lebih modern dari ayahnya. Keberhasilan Salomo dalam mengontrol pangaruh besar dinamika politik dan keagamaan diantara suku-suku di wilayah Palestina, telah membuat Salomo berhasil mengembangkan program pembangunan masal di kerajaannya. Menurut Th. C. Vrizen, keberhasilan Salomo pada program pembangunannya dapat terlihat jelas pada proses pembangunan beberapa kota seperti Hazor, Megido, Gezer yang dikembangkan menjadi benteng-benteng besar. Begitu pesat proses pembangunan tersebut, sehingga pada tahun 701 tercatat di provinsi Yahuda saja terdapat empat puluh enam kota benteng, selain desa-desa yang banyak jumlahnya. Dampak besar juga dialami oleh pola kebudayaan kota yang berkembang dengan mengambil alih berbagai adat istiadat dan konsep dari kalangan Kanaani dan dari luar wilayah itu.³⁹ Seluruh hal itu menandai kecakapan dan kesuksesan Salomo dalam mengelaborasi kekuatan-kekuatan politik-keagamaan baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung kemajuan dinasti kekuasaan yang dipimpinnya.

Perbandingan Hubungan Agama dan Politik Antara Konteks Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu

Sejarah hubungan antara entitas agama dan politik menjadi sejarah penting yang bersifat dinamis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Relasi yang bersifat resiprokal ini telah melibatkan berbagai unsur dalam dimensi sosial masyarakat yang menyebabkan terciptanya suatu proses tarik menarik kepentingan secara kolektif. Pada akhirnya relasi antara agama dan politik akan menghasilkan rekonstruksi sosial yang khusus berdasarkan nilai-nilai kolektif suatu masyarakat.

Hubungan antara entitas agama dan politik akan selalu menjadi relasi sosial yang kontekstual. Disebut demikian sebab segala bentuk konkretisasi hubungan antara agama dan politik merupakan hasil rekonstruksi sosial berdasarkan perjumpaan atau “perkawinan” antara berbagai kepentingan aktor-aktor pelaku sejarah. Hal ini nampak jelas dalam catatan perjalanan sejarah Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia pada dua periode yang berbeda. Meski Kerajaan Israel Bersatu memiliki konteks dan periodisasi eksistensi

³⁷ Hal ini dapat terlihat dari alasan mengapa Salomo memiliki begitu banyak istri yang membawa berbagai pengaruh kultus asing bagi kerajaannya. Perkawinan Salomo tidak saja merupakan simbol kedekatan hubungan diplomasi ekonomi antara Israel dengan kerajaan-kerajaan besar disekitarnya, tetapi juga merupakan simbol sinkritisme kultus keagamaan.

³⁸ Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, 42 - 43.

³⁹ Th. C Vriezen, *Agama Isarel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 190.

kekuasaan yang berbeda dengan Indonesia, tetapi kedua entitas sosial tersebut memiliki kesamaan dalam hal munculnya suatu bentuk *intersectional* antara entitas agama dan politik.

Proses persingungan antara entitas agama dan politik dalam ranah publik yang terjadi pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun Indonesia merupakan bukti adanya formalisasi kedua entitas tersebut dalam konstruksi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Formalisasi yang dimaksud tidak saja menyangkut aturan-aturan kultural dan sosial tetapi juga dasar negara dan ideologi bangsa. Pola dan proses interaksi antara entitas agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun Indonesia memperlihatkan bentuk keintiman yang bersifat integralistik dan *intersectional* sebagai suatu model *idealistic culture*.

Jika hubungan antara entitas agama dan politik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun Indonesia dibedah dengan lebih mendalam, maka kita akan memperoleh beberapa gambaran fundamental tentang relasi agama dan politik pada kedua konteks di atas. Pada konteks Kerajaan Israel Bersatu, relasi antara entitas agama dan politik terkonstruksi pada model pemerintahan dinasti Daud yang bersifat teokrasi. Model kekuasaan yang dibangun oleh dinasti Daud pada masa Kerajaan Israel Bersatu menggambarkan suatu pola konvensional yang meletakkan pengaruh agama pada porsi yang dominan sehingga segala bentuk produk yang dihasilkan dari kekuasaannya bersifat eksklusif.

Sifat eksklusifisme dari relasi entitas agama dan politik pada masa Kerajaan Israel Bersatu, pertama-tama terlihat dari proses munculnya kekuasaan tersebut hingga kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh para penguasa dinasti. Pada masa kekuasaan dinasti Daud, seorang raja dipilih atau ditunjuk berdasarkan ketetapan Tuhan yang bersifat mutlak melalui keikutsertaan para abdiNya (para nabi yang diutus). Proses yang bersifat eksklusif dan konvensional ini, secara eksplisit memperlihatkan dimensi teokrasi yang kental dan menonjol. Pada konteks kekuasaan dan kepemimpinan para penguasa di Kerajaan Israel Bersatu, peranan agama dan konsep intervensi Tuhan menjadi pusat dari sejarah panjang perjalanan kekuasaan para pemimpin dinasti.

Segala produk kekuasaan dan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh penguasa pada masa Kerajaan Israel Bersatu juga memperlihatkan sifat eksklusif yang sama. Sebagai contoh adalah upaya merekonstruksi sejarah penguasa yang kental dengan dimensi-dimensi agama seperti dalam kasus pembuatan sumber Yahwist atau sumber Y sebagai sumber utama sejarah penguasa Kerajaan Israel Bersatu. Dimensi teokrasi yang kental dalam narasi sumber ini, memperlihatkan upaya penguasa dalam menarik dimensi spiritual publik ke arah legitimasi kekuasaan dinasti. Akibatnya, sejumlah konsep pada tataran supraempiris terdeskripsikan dalam model interaksi empiris dari riwayat panjang leluhur bangsa Israel. Narasi sumber Y menjelaskan berbagai model intervensi unsur-unsur dalam entitas agama terhadap pola dan perkembangan entitas politik penguasa dinasti. Sumber Y menjadi bentuk entitas agama yang melegitimasi jabatan pemerintahan atau dinasti berdasarkan dasar kehendak Ilahi.⁴⁰

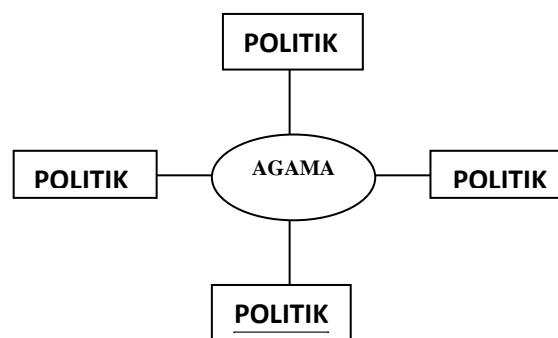
Selain persoalan narasi sumber Y yang kental dengan konsep teokrasi, penguasa Kerajaan Israel Bersatu juga merekonstruksi suatu pola pemerintahan yang sarat dengan berbagai intervensi unsur-unsur agama terhadap kebijakan-kebijakan politik penguasa. Situasi empiris yang menjelaskan perihal tersebut adalah peristiwa pemilihan dan pelantikan dua imam besar (imam Zadok dan Abyatar) yang bertugas sebagai fasilitator maupun aktor penasehat utama kerajaan dalam setiap kebijakan publik para penguasa baik

⁴⁰ Anita Inggrih Tuela dan Yemdin Wonte, YHWH: Kajian Kritis Sosial Terhadap Sumber Yahwis Dalam Kisah Abram, Yakub, dan Musa dan Implementasinya Bagi Jemaat GPIG Efrata Gentuma Gorontalo, Jurnal Tumou Tou, Vol. 5, No. 1, Januari 2018: 30-45, <https://ejournal-IAKN-Manado.ac.id>

menyangkut urusan-urusan diplomasi eksternal maupun menyangkut persoalan integrasi suku-suku di Palestina. Pengaruh diplomasi dua imam besar terhadap berbagai urusan politik praktis kerajaan, berlanjut hingga masa pasca pembuangan dimana para imam keturunan Zadok menjadi pemimpin utama umat pengganti raja dinasti baik dalam hal menyangkut administrasi negara maupun urusan-urusan kultus keagamaan.

Pada rentang periode panjang tersebut, pengaruh praktek-praktek keagamaan muncul dalam banyak kontestasi persaingan politik para elit kerajaan dinasti Daud. Berbagai unsur entitas agama tidak saja dijadikan sebagai alat propaganda politik (seperti pada proses pembuatan genealogi dalam teks-teks Tanak) tetapi juga hukum-hukum kultus yang dijadikan sebagai dasar hukum dan ideologi negara. Daud dan para penerusnya mengelaborasi kekuatan-kekuatan yang bersinggungan dengan urusan keagamaan untuk memperkokoh kedudukan dan posisi mereka secara politik. Pada titik ini, berbagai kepentingan politik penguasa yang bersinggungan dengan unsur-unsur agama berimplikasi kepada upaya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.⁴¹ Salah satu contoh nyata yang menjelaskan proses elaborasi kekuatan-kekuatan politik dan keagamaan pada masa Kerajaan Israel Bersatu guna menyukseskan kontestasi persaingan politik dinasti adalah peristiwa pemilihan Salomo menjadi raja atas Kerajaan Israel Bersatu menggantikan Daud ayahnya. Salomo yang adalah seorang pangeran kerajaan pada urutan kesepuluh dalam garis silsilah pewaris tahta Daud, telah berhasil melompati antrian kakak-kakaknya karena berbagai intrik politik-keagamaan yang dipertontonkan oleh empat tokoh besar yang berpengaruh di istana raja yakni Zadok (Imam), Benaya (panglima tentara), Natan (nabi), dan Adoram (kepala rodi).⁴² Eksistensi keempat tokoh tersebut merupakan bukti elaborasi kekuatan politik dan agama yang terintegrasi dalam ruang-ruang publik masyarakat luas.

Keseluruhan penjelasan diatas membuktikan bahwa proses persinggungan antara urusan-urusan agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu merupakan bentuk integrasi dua kekuatan entitas yang saling tumpang tindih dalam suatu sistem pemerintahan yang bersifat teokrasi. Sistem pemerintahan teokrasi di Kerajaan Israel Bersatu telah menempatkan entitas agama sebagai *core* atau pusat dari proses persinggungan antara agama dan politik dalam ruang-ruang interaksi sosial masyarakat. Jika keseluruhan penjelasan di atas tentang proses integrasi antara kekuatan entitas agama dan politik dalam konteks Kerajaan Israel Bersatu divisualisasikan, maka akan nampak sebagai berikut:⁴³



⁴¹ Hotma Parulian Sitorung, *Penguatan Identitas Kesatuan "Bangsa" Israel (Studi Sosio-Politik Terhadap Kisah Penciptaan Sumber Y Kejadian 2: 4B-25)*, Jurnal Teologi Cultivation, Vol. 3, No. 1, 2019: 628 – 640, <http://jurnal.iakntarutung.ac.id>.

⁴² Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab.*, 40.

⁴³ Gambar ini merupakan hasil elaborasi dari beberapa konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Osian Orjumi Moru.

Berbeda dengan konsep pemerintahan teokrasi di Kerajaan Israel Bersatu, negara Indonesia yang masyarakatnya lebih modern telah menempatkan urusan agama dan politik dalam porsi yang lebih proporsional. Konsep proporsional yang dimaksud adalah munculnya kesadaran komunitas tentang relasi antara agama dan politik yang harus ditempatkan dalam bingkai kemajemukan masyarakat. Kesadaran komunitas tersebut telah membawa bangsa Indonesia kepada sejarah panjang munculnya kontrak sosial yang terakumulasi dalam bingkai dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara tersebut merupakan kesepakatan mulia yang menjadi bentuk sintesis dari berbagai ideologi yang berseberangan.⁴⁴

Berbicara soal sejarah panjang terbentuknya dasar negara Indonesia, para pendiri bangsa telah bersepakat untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama tetapi bukan merupakan negara agama. Negara Indonesia merupakan hasil rajutan dari berbagai tarik-menarik kepentingan agama dan politik yang terkristalisasi dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Shaleh dan Wisnaeni, sila-sila lain dalam Pancasila haruslah bermuatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejawantahkan persoalan-persoalan bangsa seperti persatuan/kebangsaan, keadilan, kemanusiaan dan kerakyatan.⁴⁵ Dengan memperhatikan perihal tersebut maka dapat dipastikan bahwa sejarah *intersectional* antara agama dan politik di Indonesia merupakan inti dari konsensus bersama para pendiri bangsa untuk meletakkan unsur-unsur agama pada porsi yang strategis dan penting dalam berbagai urusan kenegaraan termaksud persoalan politik.

Fakta sosial masyarakat Indonesia yang plural telah menempatkan urusan relasi entitas agama dan politik menjadi relasi yang bersifat *intersectional* dalam ruang-ruang publik masyarakat. Hubungan *intersectional* tersebut tidak saja menyangkut hal-hal yang bersifat formalistik tetapi juga interaksi sosial yang kongkrit dan empiris. Hal ini menegaskan bahwa relasi agama dan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan relasi yang bersifat mutualistik.

Relasi yang bersifat mutualistik tersebut terdeskripsikan secara kongkrit dalam nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia seperti gotong royong, toleransi, keramah tamahan, persaudaraan, dan lain-lain menjadi unsur penting dalam membentuk identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan inilah yang terakumulasi dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila sebagai *the way of live* masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial telah melahirkan model pemerintahan yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan pemerintah yang lahir dari rakyat merupakan bentuk pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia tercermin tidak saja dalam hal pembentukan dasar negara tetapi juga menyangkut urusan-urusan politik praktis kenegaraan. Sebut saja pola pemilihan kepala negara yang berdasarkan hak kedaulatan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan proses politik yang demokratis. Meski proses pemilihan tersebut didasarkan pada kehendak rakyat namun seorang calon kepala negara wajib memenuhi beberapa syarat pencalonan yang menegaskan

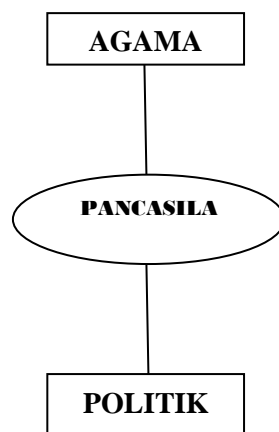
⁴⁴ Ahmad Sadzali, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam pembentukan dan perubahan Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. 2020: 341-375. <https://ujh.unja.ac.id>

⁴⁵ Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 2 (2019): 237-249.

kelayakan dirinya dalam proses demokrasi tersebut. Beberapa syarat tersebut adalah Bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mampu secara rohani dan jasmani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain.⁴⁶ Syarat-syarat tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila pertama pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini membuktikan bahwa ranah politik praktis di Indonesia tidak terlepas dari urusan-urusan keagamaan. Urusan politik menjadi urusan yang bersingungan langsung dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kultural masyarakat. Fakta ini tidak terlepas dari kondisi empiris masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya terdiri dari pemeluk-pemeluk agama yang beragam. Kondisi tersebut membuat urusan politik praktis di Indonesia selalu bersingungan dengan unsur-unsur agama dan kepercayaan. Hal ini menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih bersifat kultural konvensional dan menempatkan instrumen agama sebagai entitas yang dapat dijadikan “dagangan” politik.⁴⁷ Contoh kasus terhadap perihal diatas dapat dilihat dalam dinamika peristiwa pemilu maupun pemilukada yang memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya sampai urusan pengisian jabatan birokrasi di berbagai level struktur organisasi ASN.

Meski Indonesia bukan negara teokrasi, tetapi urusan agama dan politik selalu menjadi urusan yang bersingungan dalam ruang-ruang publik masyarakat. Konsep persingungan antara entitas agama dan politik di Indonesia yang bersifat *intersectional* telah menyebabkan negara Indonesia menjadi negara majemuk yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Jika penjelasan di atas tentang hubungan antara entitas agama dan politik dalam konteks Indonesia divisualisasikan secara kongkrit maka akan nampak sebagai berikut:⁴⁸



Gambaran hubungan antara entitas agama dan politik dalam konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu merupakan dua gambaran kontekstual yang berbeda. Perbedaan tersebut nampak jelas pada model konstruksi kekuasaan, konsep dasar konstitusi bangsa sampai pembentukan ideologi negara. Namun di antara perbedaan kontekstual yang beragam tersebut, terdapat persamaan penting menyangkut konstruksi hubungan antara

⁴⁶ Arlis, “Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, no. 2 (2017): 364–383.

⁴⁷ Idrus Ruslan, *Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik*, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014: 161-172. <https://core.ac.uk>

⁴⁸ Gambar ini merupakan hasil elaborasi dari beberapa konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Osian Orjumi Moru.

agama dan politik baik pada konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu. Persamaan yang dimaksud terlihat jelas dalam upaya penempatan entitas agama sebagai unsur penting dan strategis dalam berbagai urusan perpolitikan negara.

Baik pada konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu, hubungan antara entitas agama dan politik dipertemukan dalam suatu rekognisi bersama tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam ruang publik masyarakat. Berbagai urusan agama ditampung dalam ketentuan-ketentuan negara yang mengatur kehidupan masyarakat luas hingga menghasilkan dasar konstitusi bersama. Nilai-nilai agama dijadikan sebagai asas publik yang berpengaruh bagi terbentuknya nilai luhur kebangsaan.

Implikasi

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para akademisi maupun jemaat awam dalam merekonstruksi dan memetakan konsep hubungan antara entitas agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia pada masa kini. Isi artikel ini akan membantu pembacanya dalam melihat konstruksi hubungan yang bersifat integralistik dan *intersectional* antara entitas agama dan politik dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat yang bersifat majemuk. Persinggungan antara entitas agama dan politik dalam konteks masyarakat plural harus menjadi persinggungan yang bersifat konstruktif dan progresif. Melalui tulisan artikel ini, para pembacanya diharapkan dapat memahami berbagai implikasi luas dari persinggungan antara entitas agama dan politik dalam konteks perjalanan sejarah masyarakat dunia. Pemahaman terhadap berbagai implikasi tersebut berhubungan erat dengan rekonstruksi sejarah suatu kekuasaan, konsep dasar konstitusi bangsa sampai pembentukan ideologi suatu negara.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Tulisan artikel ini merupakan suatu konstruksi dasar dari ide penulis terhadap relasi antara entitas agama dan politik dalam perbandingan dua konteks kekuasaan yang berbeda. Penulis mengharapkan ide awal ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam tulisan-tulisan artikel selanjutnya demi mencari suatu konstruksi *intersectional* yang paling ideal tentang relasi entitas agama dan politik dalam berbagai konteks masyarakat. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat menjadi dasar referensi penting dalam pengembangan ide-ide tulisan selanjutnya tentang relasi antara agama dan politik dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Kesimpulan

Fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara entitas agama dan politik akan selalu menjadi persoalan kontekstual yang berlangsung secara dinamis dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Hubungan entitas agama dan politik akan selalu berlangsung dalam konteks instrumentalisasi yang bermuatan asosiatif maupun disosiatif. Segala bentuk formalisasi, intepretasi, maupun konkretisasi agama akan menjadikan relasi entitas agama dan politik menjadi relasi yang bersifat integralistik, *intersectional*, ataupun sekularistik. Relasi antara entitas agama dan politik baik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun pada konteks Indonesia sebagai negara modern, memperlihatkan pola relasi dua entitas yang memiliki kebersinggungan yang erat dan bersifat dinamis. Meski berbeda dalam konsep pemerintahan, namun hubungan yang bersifat integralistik dan *intersectional* antara agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia, memperlihatkan suatu model konstruksi kekuasaan dan pembentukan dasar negara yang bersifat kolateral. Hal tersebut tercermin jelas dalam pola dan proses pemilihan raja atau kepala pemerintahan yang melibatkan pengaruh agama dalam dunia politik, elaborasi ideologi dan dasar negara seperti dalam pembentukan sumber Y dan Pancasila,

sampai pada bentuk-bentuk konkritisasi interaksi sosial masyarakat yang selalu berhubungan dengan dinamika sosial-keagamaan. Pada titik ini, hubungan dialogis antara entitas agama dan politik pada konteks Kerajaan Israel Bersatu maupun negara Indonesia merupakan cermin terciptanya suatu bentuk *idealistic culture*.

Rujukan

- Arlis. "Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 364-383.
- Coote, Robert B. & Mary P. Coote. *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Coote, Robert B. & Ord. *Sejarah Pertama Alkitab: Dari Eden Hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y*. Jakarta: BPK Gunung Mulian & UKSW, 2015.
- Fadhilah. "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Persepektif Keindonesiaan." *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 25-37.
- Giawa, Nasokhili. "Kepemimpinan Nehemia Dan Relevansinya Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Di Indonesia." *Jurnal Jireh* 1, no. 2 (2019).
- Gottwald, Norman K. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1987.
- Jahroh, Siti. "Politik Keagamaan Di Indonesia: Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *In Right (Jurnal Agama dan Ha Azazi Manusia)* 1, no. 1 (2011): 218-239.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama." *Jurnal Walisongo* 22, no. 1 (2014): 133 - 156.
- Ma'arif, Samsul. "Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason)." *Jurnal UGM* 16, no. 2 (2006): 189-201.
- Moru, Osian Orjumi. "Mereposisi Hubungan Antara Agama Dan Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen." *Jurnal Taruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 118-132.
- — —. "Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian." *Jurnal Kenosis* 7, no. 2 (2021): 219-244.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- — —. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996.
- — —. *The Idea of Public Reason Revisited Dalam Samuel Freeman (Ed), John Rawls Collected Papers*. Cambridge: Harvard university Press, 2001.
- Ridwan. "Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna." <https://media.neliti.com> 12, no. 2 (2017): 223 - 236.
- Ruslan, Idrus. Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014: 161-172. <https://core.ac.uk>
- Sadzali, Ahmad. *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam pembentukan dan perubahan Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. 2020: 341-375. <https://ujh.unja.ac.id>
- Shaleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237-249.
- Sitorung, Hotma Parulian. Pengukuhan Identitas Kesatuan "Bangsa" Israel (Studi Sosio-Politik Terhadap Kisah Penciptaan Sumber Y Kejadian 2: 4B-25), Jurnal Teologi Cultivation, Vol. 3, No. 1, 2019: 628 - 640, <http://jurnal.iakntarutung.ac.id>.
- Tuela, Anita Inggrith dan Yemdin Wonte, YHWH: Kajian Kritis Sosial Terhadap Sumber Yahwis Dalam Kisah Abram, Yakub, dan Musa dan Implementasinya Bagi Jemaat GPIG Efrata Gentuma Gorontalo, Jurnal Tumou Tou, Vol. 5, No. 1, Januari 2018: 30-45, <https://ejournal-IAKN-Manado.ac.id>

Vriezen, Th. C. *Agama Isarel Kuno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

Nurhayati, Yati. "Posisi Agama Dalam Ranah Politik Di Indonesia." *https://www.neiti.com*. 5, no. 9 (2013): 14-21.

Yuliranza, Resti Vani. "Dalam Teori-Teori Yang Memberi Dasar Negara Hukum Bagi Kekuasaan Negara." Last modified 2017. Accessed January 1, 2022. <http://osf.io>.